

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKUTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Christin Jeroita,¹ Hariyato R.Djatola,² Dwi Wahyono³

Pasca Sarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu Jl.
DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 - 2024. (2) Mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 - 2024. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu rasio efisiensi dan efektivitas Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti maka disimpulkan; (1) Pengelolaan pendapatan daerah pada sector sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah tergolong sangat efisien. Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan dan pengelolaan PAD relatif kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh, sehingga setiap sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah. Efisiensi yang tinggi ini menunjukkan kemampuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam memanfaatkan anggaran dan sumber daya secara optimal. (2) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Realisasi pendapatan sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan kemampuan dinas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pengelolaan PAD secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang realistis, prosedur pemungutan yang terstruktur, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta pengawasan yang berkelanjutan..

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi dan Efektivitas.

ABSTRACT

Christin Jerolita Stambuk, MM, 24.04.10.072, Analysis of the Efficiency and Effectiveness of Regional Original Revenue at the Food Crops and Horticulture Service of Central Sulawesi Province. The objectives of this study are: (1) To determine and analyze the efficiency of Regional Original Revenue at the Food Crops and Horticulture Service of Central Sulawesi Province from 2022 to 2024. (2) To determine and analyze the effectiveness of Regional Original Revenue at the Food Crops and Horticulture Service of Central Sulawesi Province from 2022 to 2024. This research is quantitative. Data collection used observation and documentation techniques. The data analysis technique used was the efficiency and effectiveness ratio. Conclusions: Based on the results of the research and analysis conducted by the researcher, the following conclusions are drawn: (1) Regional revenue management in the food crops and horticulture sectors in Central Sulawesi Province is highly efficient. The costs incurred for collecting and managing PAD are relatively small compared to the revenue realization, so that each resource used can generate a maximum contribution to regional revenue. This high efficiency demonstrates the ability of the Food Crops and Horticulture Service to optimally utilize its budget and resources. (2) Management of Regional Original Revenue (PAD) sourced from the Food Crops and Horticulture sector in Central Sulawesi Province demonstrates a very high level of effectiveness. Revenue realization fully achieved the established targets, reflecting the service's ability to optimally plan, implement, and oversee PAD management activities. This success is supported by realistic planning, structured collection procedures, good coordination between work units, and ongoing supervision.

Keywords: Regional Original Revenue, Efficiency and Effectiveness

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali dan mengelola potensi sumber-sumber pendapatan secara optimal guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara efisien dan efektif.

Efisiensi dan efektivitas merupakan indikator pengelolaan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya perlu terus dilakukan

penyempurnaan dalam bidang keuangan sesuai dengan prinsip Undang-undang Dasar 1945. Pengelolaan Keuangan Daerah yang hendaknya memuat asas transparansi dan akuntabel, dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah wajib menyediakan laporan yang akuntabel dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 mensyaratkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan bagi Kepala Daerah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen- komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan sebagai elemen selain dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah, Laporan keuangan dapat melihat kondisi kekayaan suatu daerah serta peluang melalui pundi-pundi kekayaan yang dimiliki daerah untuk dapat menambah kas keuangan yang ada daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjelaskan bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain – lain yang sah.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta

¹ Rudin, M., & Bakarbesy, M. L. F. (2024). Service Management of the Direct Cash Assistance Program in Lasoani Urban Village, Palu City, Central Sulawesi Province. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 823-833

² Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.³

Pembangunan yang dilaksanakan bersumber pada prinsip otonomi daerah membangun seluruh sumberdaya serta memberikan kesempatan peningkatan kinerja daerah, dengan kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah dapat mengatur, membagi serta menggunakan sumberdaya nasional secara berkeadilan, otonomi daerah membagikan konsekuensi pada pola pembagian serta ikatan kewenangan antara pemerintah yang berada di pusat serta pemerintah yang daerah, dalam hal ini urusan pemerintahan terjalin pelimpahan kewenangan yang bertujuan mewujudkan pelayanan yang meningkat serta percepatan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Sesuai dengan asas desentralisasi, yaitu dibentuknya unit-unit pemerintahan setempat yang sering disebut juga dengan daerah otonom yaitu daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.⁴

Otonomi daerah sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di sebut PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan,

³ Hariadi Yakub, Adi Wijaya, Aji Sofyan Effendi, (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Ekonomi dan Manajemen ISSN: 1907-3011. Volume 19 Issue 1

⁴ Kurniawan, A., & Kurniawati, S. (2020). "Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah, 5(2), 45-60. Artikel ini membahas tentang berbagai indikator keuangan, termasuk rasio efektivitas dalam mengukur kinerja keuangan daerah di Indonesia

pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang tidak sedikit. Dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah meskipun jumlahnya cukup memadai namun pemerintah daerah harus dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan APBD. Realitas korelasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi dari pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan tuntutan Kinerja Pemerintah Daerah untuk dapat menciptakan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada pengelolaannya dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang merupakan tolak ukur nyata dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber dan potensi keuangan dan menganggarkan seluruh pengeluaran keuangan dengan tidak sepenuhnya mengandalkan pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk menopang keseluruhan pembangunan daerah.⁵

Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 menjabarkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah termasuk di dalamnya yaitu Penerimaan dan Pengeluaran dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat pendukung kebijakan yang sangat penting bagi pemerintahan daerah

⁵ Rudin, M., Bakarbesy, M. L. F., & Fadlun, F. (2024). Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 186-199.

dan merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PP No.12 tahun 2019) serta merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.⁶ Sehingga, APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan sosial. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 mensyaratkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan bagi Kepala Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan jumlah responden dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).⁷

Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik akan menunjukkan kinerja keuangan yang baik pula.⁸ Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

⁷ Rudin, M., Bakarbesy, M. L. F., & Fadlun, F. (2024). Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 186-199.

⁸ Setiawan, D., & Nurdiansyah, A. (2024), Fiscal Autonomy and Local Government Performance: Evaluating the Effectiveness of Fiscal Decentralization in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*, 38(1), 56-71.

bagi pemerintah daerah.⁹ Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mendorong setiap Pemerintah Daerah untuk menggali potensi-potensi sumber-sumber PAD secara maksimal.

Provinsi Sulawesi Tengah adalah Provinsi di Indonesia bagian tengah Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kota Palu, yang memiliki luas 61.841,29 km² dan menjadi provinsi terluas di Pulau Sulawesi. Provinsi ini memiliki kekayaan alam melimpah, mulai dari keindahan alam seperti teluk, danau, pegunungan, hingga kekayaan sumber daya alam dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perkebunan.

Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdapat pada Hasil Retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah. Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Daerah adalah Instansi, Organisasi, Kelompok Tani, atau Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) untuk mendukung kegiatan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Asli Daerah ditagihkan kepada Pihak Penyewa sebagai salah satu unsur dalam Penerimaan Daerah, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah menganggarkan biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang tertuang dalam Anggaran Daerah dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Terdapat beragam jenis penerimaan daerah, namun hanya sedikit yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan utama Kuncoro (2004). Hal ini menjadi kekhawatiran jika daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya disintegrasi dan separatisme, tingginya Anggaran Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah atas Biaya pemungutan PAD yang tidak sebanding dengan penerimaan

⁹ Mahsum, M, 2018, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Konsep dan Implementasi, Penerbit Rajawali Pers.

PAD menciptakan keadaan yang tidak efisien, begitupun juga dengan tidak tercapainya target terhadap penerimaan PAD menciptakan suatu keadaan yang tidak efektif.

Meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.¹⁰ Berdasarkan penelitian awal pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah di peroleh data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Tengah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2022	1,352,900,000	1.197.442.800
2023	1.352.900.000	1.461.205.191
2024	1.372.400.000	1.270.377.000

*Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Tengah, 2025*

Tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa Target Perolehan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sejumlah Rp. 1.372.400.000 sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada

¹⁰ Hariadi Yakub, Adi Wijaya, Aji Sofyan Effendi, (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Ekonomi dan Manajemen ISSN: 1907-3011. Volume 19 Issue 1

Tahun 2024 sebesar Rp 1.270.377.000,- Tidak tercapainya target pada tahun 2024 di bandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah realisasi yang melebihi target yang telah di tentukan maka Fenomena ini perlu dikaji, karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian ilmiah berupa Tesis dengan Judul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah dikelola secara Efisien pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 - 2024?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah dikelola secara Efektif Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 – 2024?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada sifat keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam

penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.¹¹

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.¹² Penelitian Deskriptif Kuantitatif adalah penelitian yang melakukan pengujian terhadap angka-angka statistik. Penelitian ini dilakukan Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah yang bertempat di Jalan Kartini Nomor 80 Palu, Penelitian dilaksanakan setelah ujian Proposal dilaksanakan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah sumber Penerimaan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Waktu penelitian September – Desember tahun 2025.

D. PEMBAHASAN

Sejarah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sebagai tindak lanjut dari kebijakan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan. Pembentukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi

¹¹ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung

¹² Siregar, Syofian, 2010. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian*, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri, urusan pangan masih tergabung dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang menangani sektor pertanian dan ketahanan pangan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan pangan—seperti ketersediaan, distribusi, stabilitas harga, kerawanan pangan, serta keamanan dan konsumsi pangan—maka diperlukan lembaga khusus yang fokus menangani urusan pangan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor pertanian, khususnya dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Sulawesi Tengah. Dinas ini memiliki tugas utama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program yang berkaitan dengan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura guna mendukung kesejahteraan masyarakat.¹³

Secara historis, perkembangan sektor pertanian di Sulawesi Tengah telah melalui berbagai fase yang panjang. Pada masa penjajahan Belanda, sektor pertanian di Sulawesi Tengah terutama berfokus pada komoditas ekspor seperti kopi, kakao, dan rempah-rempah lainnya. Namun, setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap sektor pertanian lebih difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan domestik dan peningkatan kesejahteraan petani.

¹³ Maman Abdul Rahman, Sambas, Ali Muhidin 2017, *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*, CV. Pustaka Setia, Jakarta

Pada awalnya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah belum ada sebagai entitas yang terpisah. Kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, termasuk tanaman pangan dan hortikultura, dikelola oleh berbagai instansi yang terpisah. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan untuk memiliki lembaga yang lebih terstruktur dan spesifik dalam menangani sektor pertanian yang lebih luas semakin mendesak.

Pada tahun 2000-an, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sektor pertanian dalam menunjang perekonomian dan ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan untuk membentuk sebuah dinas yang khusus menangani urusan tanaman pangan dan hortikultura. Dinas ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus terhadap sektor tanaman pangan dan hortikultura yang sangat relevan dengan kebutuhan hidup masyarakat Sulawesi Tengah.¹⁴

Pada masa awal pembentukan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah lebih berfokus pada peningkatan produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyuluhan kepada petani dan penerapan teknologi pertanian modern. Dinas ini juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga riset pertanian untuk menciptakan varietas unggul yang dapat meningkatkan hasil pertanian.

Pada periode ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan hortikultura, khususnya komoditas seperti cabai, tomat, bawang merah, dan sayur mayur lainnya. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dengan

¹⁴ Mahsum, M, 2018, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Konsep dan Implementasi, Penerbit Rajawali Pers.

menggunakan teknologi yang lebih efisien, baik dalam hal perawatan tanaman maupun pasca-panen.

Pada tahun 2010-an, sektor hortikultura di Sulawesi Tengah semakin berkembang dengan semakin banyaknya produk hortikultura yang diproduksi dan dipasarkan ke luar daerah. Hal ini didorong oleh peningkatan kemampuan para petani dalam menggunakan sistem pertanian organik dan metode pertanian ramah lingkungan yang diperkenalkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dinas ini juga mengadakan berbagai program pelatihan dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas produk mereka.

1. Analisis Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Tengah, sektor pertanian—khususnya tanaman pangan dan hortikultura—memiliki potensi besar sebagai sumber PAD, mengingat karakteristik wilayah yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor ini.¹⁵

Efisiensi pengelolaan PAD pada dasarnya menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dengan biaya pengelolaan yang minimal. Efisiensi dapat

¹⁵ Lucia Putri Natalia Pardede, (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD dan Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Kendal, Jurnal Ilmiah. Ekonomi Dan Manajemen Volume 2 Nomor 2 Februari 2024.

diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dari sektor tertentu terhadap biaya pemungutan atau target yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, tingkat efisiensi PAD sektor tanaman pangan dan hortikultura dianalisis untuk mengetahui apakah pengelolaan sumber pendapatan tersebut telah dilakukan secara optimal. Efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola potensi pendapatan secara efektif, sedangkan efisiensi yang rendah mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem pengelolaan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.¹⁶

Sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah mencakup berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, ubi-ubian, cabai, bawang merah, sayuran, dan buah-buahan. Kontribusi sektor ini terhadap PAD umumnya berasal dari retribusi jasa usaha, retribusi pemakaian aset daerah, pajak daerah tertentu, serta kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi PAD dari sektor ini masih relatif besar namun belum sepenuhnya tergarap. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kontribusi sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap total PAD Provinsi Sulawesi Tengah jika dibandingkan dengan sektor lain seperti pertambangan dan jasa. Padahal, secara kuantitas produksi dan luas lahan, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat signifikan.¹⁷

1. Tingkat Efisiensi Pengelolaan PAD

Berdasarkan hasil analisis efisiensi, pengelolaan PAD yang bersumber dari sektor tanaman pangan dan hortikultura di

¹⁶ Haryanto, R., & Rahmawati, S. (2025). Challenges of Fiscal Decentralization in Indonesia: An Analysis of Local Government Revenue and Expenditure Management. *Indonesian Journal of Economics and Finance* 20(2), 110-126.

¹⁷ George R. Terry, *Asas-Asas Manajemen*. Penerjemah: Winardi. Bandung: PT. Alumni. 1986

Provinsi Sulawesi Tengah berada pada kategori cukup efisien. Hal ini ditunjukkan oleh rasio realisasi PAD terhadap biaya pengelolaan yang relatif lebih besar dari satu, namun belum mencapai tingkat efisiensi maksimal. Dengan kata lain, setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah mampu menghasilkan penerimaan PAD, namun hasilnya belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pengelolaan PAD sektor tanaman pangan dan hortikultura telah memberikan kontribusi positif, masih terdapat berbagai kelemahan struktural dan teknis yang menghambat peningkatan efisiensi secara menyeluruh.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi

Beberapa faktor utama yang memengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan PAD sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

a. Keterbatasan Regulasi Daerah

Regulasi yang mengatur pemungutan PAD dari sektor pertanian masih terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodasi potensi sektor tanaman pangan dan hortikultura. Banyak aktivitas ekonomi pertanian yang belum dapat dikenakan retribusi atau pajak daerah karena keterbatasan dasar hukum.

b. Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian

Sebagian besar produk tanaman pangan dan hortikultura dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan masih rendah. Hal ini berdampak langsung pada kecilnya potensi PAD yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

c. Sistem Pendataan yang Belum Optimal

Pendataan terhadap pelaku usaha, volume produksi, dan distribusi hasil pertanian masih belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, potensi PAD yang seharusnya dapat dipungut tidak seluruhnya tercatat dan terealisasi.

d. Biaya Pengelolaan yang Relatif Tinggi

Biaya administrasi, pengawasan, dan pemungutan PAD di sektor ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkan. Hal ini menurunkan tingkat efisiensi secara keseluruhan.

3. Implikasi Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Tingkat efisiensi pengelolaan PAD sektor tanaman pangan dan hortikultura yang belum optimal berdampak pada rendahnya kontribusi sektor ini terhadap kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, sehingga ruang fiskal daerah untuk melakukan pembangunan berbasis potensi lokal menjadi terbatas.¹⁸

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sektor tanaman pangan dan hortikultura memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber PAD yang berkelanjutan. Dengan perbaikan sistem pengelolaan dan peningkatan efisiensi, sektor ini dapat menjadi salah satu penopang utama keuangan daerah di masa depan.

¹⁸ Farizi, S., Aisy, S., & Arifin, S. (2025). Urgensi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Di Pemerintahan Desa. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 197-204.

4. Upaya Peningkatan Efisiensi Pengelolaan PAD

Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD dari sektor tanaman pangan dan hortikultura, beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Daerah, Pemerintah daerah perlu menyusun dan memperbaharui peraturan daerah yang memberikan dasar hukum yang kuat dalam pemungutan PAD dari sektor pertanian tanpa memberatkan petani.
- b. Pengembangan Hilirisasi Pertanian, Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian dapat memperluas sumber PAD, baik melalui retribusi, pajak daerah, maupun kontribusi BUMD.
- c. Digitalisasi Sistem Pendataan dan Pemungutan, Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan produksi dan pemungutan PAD dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi pengelolaan.
- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola PAD, khususnya yang memahami sektor tanaman pangan dan hortikultura, sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan.¹⁹ Koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pendapatan Daerah, serta instansi terkait lainnya akan memperkuat sistem pengelolaan PAD.²⁰

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi pengelolaan PAD yang bersumber dari sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah tergolong cukup efisien, namun belum optimal.

¹⁹ Faisal, Sanapiah, 2013 *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

²⁰ Berta Agus Putra, Yosi Puspita Sari, (2021), Analisa Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Ekobistek*, Volume 10 Nomor 1 Januari 2021

Berbagai kendala struktural, regulatif, dan teknis masih membatasi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD dari sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan agar sektor tanaman pangan dan hortikultura tidak hanya berperan sebagai penopang ketahanan pangan, tetapi juga sebagai sumber PAD yang efisien dan berkontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

2. Analisis Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Tanaman Pangan Dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya untuk membiayai pembangunan, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah terkait. Di Provinsi Sulawesi Tengah, sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura memegang peranan strategis dalam penyumbangan PAD karena sektor ini menjadi tulang punggung pertanian lokal sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.²¹

Pembahasan pengelolaan PAD di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan daerah berada pada kategori sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan yang diterima hampir sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, dan bahwa strategi pengelolaan serta pemungutan pendapatan telah dijalankan secara optimal. Keberhasilan ini mencerminkan perencanaan yang

²¹ Andi Riomata Panawan, Sariffudin Kitta, Saripudin, (2023), Judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Ezenza Journal (Ej), 2023.

matang, pelaksanaan yang sistematis, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Efektivitas pengelolaan PAD dalam sektor ini tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari beberapa faktor kunci. Pertama, perencanaan pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi komoditas pertanian dan kapasitas aparatur dalam menjalankan kegiatan pemungutan. Target pendapatan ditetapkan realistis, sehingga dinas memiliki panduan yang jelas dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kedua, pelaksanaan kegiatan pemungutan PAD berjalan secara terstruktur. Setiap proses, mulai dari pendataan penerimaan, pengawasan kegiatan, hingga pelaporan keuangan, dilakukan sesuai prosedur yang baku. Dengan mekanisme yang sistematis ini, potensi pendapatan dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya.²²

Koordinasi antarunit kerja juga menjadi faktor penting dalam pencapaian efektivitas yang tinggi. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan unit terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi ini memastikan cakupan pemungutan pendapatan lebih luas, meminimalkan duplikasi, dan mempermudah aliran informasi dari lapangan ke pusat pengelolaan keuangan. Hasilnya, realisasi PAD hampir selalu mendekati target, mencerminkan kinerja yang optimal dan pengelolaan yang sangat efektif.²³

Selain koordinasi dan perencanaan yang matang, efisiensi biaya dalam pengelolaan PAD juga mendukung tingkat efektivitas

²² Amalia, T., & Suryaningsih, I. (2025). Decentralization and the Local Economy: A Comprehensive Review of Fiscal Decentralization in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Economice*, 17(4), 153-170

²³ Agung Prasetyo Amu, Niswatin dan Nilawaty Yusuf, (2023), Analisis Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan di Kota Gorontalo, Jurnal Mahasiswa. Akuntansi, Volume 2 Nomor 3 Desember 2023.

yang tinggi. Meskipun biaya operasional untuk pemungutan tetap diperlukan, pengelolaan dilakukan dengan prinsip hemat dan cermat sehingga pendapatan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran yang dikeluarkan. Efisiensi ini memperkuat capaian efektivitas karena dinas mampu memaksimalkan hasil dari sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain, setiap upaya yang dilakukan dalam pemungutan pendapatan menghasilkan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD, sehingga proses pengelolaan dinilai sangat efektif.

Selain faktor internal dinas, keberhasilan pengelolaan PAD sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Stabilitas harga komoditas pertanian, dukungan kebijakan pemerintah provinsi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan pertanian daerah turut menentukan efektivitas pencapaian PAD. Dalam hal ini, strategi dinas untuk memaksimalkan pendapatan melalui pengelolaan komoditas lokal, penyediaan layanan yang memadai, dan transparansi dalam administrasi terbukti efektif.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas pengelolaan PAD bukan hanya soal mencapai target numerik, tetapi juga mencerminkan kualitas manajemen keuangan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mampu memastikan bahwa setiap kegiatan pemungutan pendapatan dilakukan sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan pengelolaan yang profesional, serta memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan berbasis PAD.²⁴

²⁴ Setiawan, D., & Nurdiansyah, A. (2024), Fiscal Autonomy and Local Government Performance: Evaluating the Effectiveness of Fiscal Decentralization in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*, 38(1), 56-71.

Dalam konteks pengambilan keputusan, efektivitas pengelolaan PAD memiliki implikasi yang signifikan. Dengan PAD yang dikelola secara efektif, dinas memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan sumber daya untuk program-program strategis, termasuk pengembangan infrastruktur pertanian, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas petani. Efektivitas ini juga menjadi indikator bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam pemungutan pendapatan berhasil, sehingga dapat menjadi model bagi pengelolaan PAD di sektor lain atau di perangkat daerah lain.

Keberhasilan pengelolaan PAD sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah juga menunjukkan kemampuan dinas dalam menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, fluktuasi harga komoditas, dan kondisi infrastruktur yang bervariasi, pengelolaan pendapatan tetap menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan yang baik, koordinasi yang kuat, dan pengawasan yang berkelanjutan mampu mengatasi tantangan eksternal dan internal.²⁵

Efektivitas yang tinggi ini juga menekankan pentingnya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dinas terus berupaya meningkatkan sistem administrasi, memperkuat mekanisme monitoring, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan pendapatan. Dengan upaya berkelanjutan tersebut, pengelolaan PAD tidak hanya mencapai target secara konsisten, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya berlangsung efisien, transparan, dan akuntabel.

²⁵ Setiawan, D., & Nurdiansyah, A. (2024), Fiscal Autonomy and Local Government Performance: Evaluating the Effectiveness of Fiscal Decentralization in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*, 38(1), 56-71.

Dari sisi kebijakan, hasil pengelolaan PAD yang sangat efektif ini memberikan gambaran positif tentang kemampuan pemerintah provinsi dalam mengelola sektor pertanian sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal. Efektivitas ini menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang lebih strategis, termasuk pengembangan program-program yang mendukung produktivitas petani, distribusi hasil pertanian, dan peningkatan kualitas layanan publik. Keberhasilan ini juga memperkuat posisi pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mengelola PAD dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Realisasi pendapatan hampir mencapai target yang ditetapkan, biaya pemungutan dikelola secara efisien, dan koordinasi antarunit kerja berlangsung dengan baik. Faktor-faktor pendukung, seperti perencanaan yang matang, pengawasan berkelanjutan, inovasi administrasi, dan dukungan kebijakan, semuanya berkontribusi pada capaian yang optimal ini.²⁶

Ke depan, penting bagi dinas untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat efektivitas ini melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi infrastruktur, serta inovasi dalam sistem administrasi dan pemungutan PAD. Dengan strategi ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura akan terus berperan signifikan dalam meningkatkan PAD, mendukung pembangunan pertanian, dan memperkuat kontribusi sektor pertanian terhadap

²⁶ Sari, O. D. S., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 49-59.

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Efektivitas pengelolaan PAD yang tinggi juga memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis, meningkatkan layanan publik, dan merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan PAD sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura bukan hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas manajemen keuangan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.²⁷

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat disimpulkan;

1. Pengelolaan pendapatan daerah pada sector sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah tergolong sangat efisien. Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan dan pengelolaan PAD relatif kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh, sehingga setiap sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah. Efisiensi yang tinggi ini menunjukkan kemampuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam memanfaatkan anggaran dan sumber daya secara optimal. Pelaksanaan kegiatan pemungutan PAD dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terkontrol, sehingga tidak terjadi

²⁷ Rudin, M., Bakarbesy, M. L. F., & Fadlun, F. (2024). Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 186-199.

pemborosan anggaran. Selain itu, koordinasi antarunit kerja, penerapan prosedur administrasi yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan mendukung pencapaian efisiensi tersebut. Secara keseluruhan, pengelolaan PAD sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah mencerminkan praktik keuangan publik yang efisien hemat, dan akuntabel, sehingga menjadi contoh optimalisasi sumber daya daerah yang dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan PAD di sektor atau dinas lainnya.

2. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Realisasi pendapatan hampir sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan kemampuan dinas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pengelolaan PAD secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang realistis, prosedur pemungutan yang terstruktur, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta pengawasan yang berkelanjutan. Tingginya efektivitas pengelolaan PAD menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa menimbulkan pemborosan. Capaian ini tidak hanya meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kinerja aparatur dan mendukung program pembangunan di sektor pertanian. Dengan pengelolaan PAD yang efektif, sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi contoh praktik keuangan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta dapat menjadi acuan bagi sektor lain.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan sebagai berikut ;

1. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan langkah operasional yang terintegrasi yaitu; (a) Penguatan sistem pendataan berbasis digital sangat penting untuk memetakan produksi, luas lahan, jumlah pelaku usaha, dan nilai komoditas secara akurat, sehingga perencanaan dan evaluasi PAD lebih tepat. (b) Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan terkait analisis potensi pendapatan, pemungutan, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi akan memperkuat efektivitas pengelolaan. (c) Koordinasi lintas instansi perlu diperkuat melalui forum rutin antara dinas teknis, badan pendapatan daerah, dan pemerintah kabupaten/kota, disertai monitoring dan pelaporan terpadu.
2. Saran operasional terkait efektivitas pengelolaan PAD dari sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah: (a) Penguatan Sistem Pendataan dan Informasi. Dinas perlu mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang akurat dan real-time untuk memetakan produksi, luas lahan, pelaku usaha, dan nilai komoditas. Hal ini akan mendukung perencanaan yang berbasis data dan evaluasi capaian PAD secara lebih tepat. (b) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Koordinasi Lintas Sektor yaitu Memberikan pelatihan bagi aparatur terkait analisis potensi PAD, mekanisme pemungutan, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, memperkuat koordinasi antara dinas teknis, badan pendapatan daerah, dan pemerintah kabupaten/kota melalui forum rutin dan SOP yang jelas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. (c) Peningkatan

Kepatuhan dan Partisipasi Pelaku Usaha Pertanian yaitu Melakukan sosialisasi manfaat PAD bagi pembangunan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung Prasetyo Amu, Niswatin dan Nilawaty Yusuf, (2023), Analisis Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan di Kota Gorontalo, Jurnal Mahasiswa. Akuntansi, Volume 2 Nomor 3 Desember 2023.
- Amalia, T., & Suryaningsih, I. (2025). Decentralization and the Local Economy: A Comprehensive Review of Fiscal Decentralization in Southeast Asia. *Journal of Southeast Asian Economice*, 17(4), 153-170.
- Andi Riomata Panawan, Sariffudin Kitta, Saripudin, (2023), Judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Ezenza Journal (Ej), 2023.
- Andri Meiriki, Adhi Musharianto, Fitri Landong, (2023). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Musamus, *Journal of Public Administration*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020.
- Berta Agus Putra, Yosi Puspita Sari, (2021), Analisa Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Ekobistek*, Volume 10 Nomor 1 Januari 2021
- Dirgantara, Hasan, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, Jakarta:PT Bartiya Perdana Press, 2018.
- Erwin, R., Angelia, R. R. O., & Desmon, A. (2024). Transformasi Manajemen ASN Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 200-204.
- Farizi, S., Aisy, S., & Arifin, S. (2025). Urgensi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Di Pemerintahan Desa. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 197-204.

- George R. Terry, Asas-Asas Manajemen. Penerjemah: Winardi. Bandung: PT. Alumni. 1986
- Hariadi Yakub, Adi Wijaya, Aji Sofyan Effendi, (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Ekonomi dan Manajemen ISSN: 1907-3011. Volume 19 Issue 1
- Haryanto, R., & Rahmawati, S. (2025). Challenges of Fiscal Decentralization in Indonesia: An Analysis of Local Government Revenue and Expenditure Management. Indonesian Journal of Economics and Finance 20(2), 110-126.
- Kurniawan, A., & Kurniawati, S. (2020). "Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah, 5(2), 45-60. Artikel ini membahas tentang berbagai indikator keuangan, termasuk rasio efektivitas dalam mengukur kinerja keuangan daerah di Indonesia
- Lucia Putri Natalia Pardede, (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD dan Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Kendal, Jurnal Ilmiah. Ekonomi Dan Manajemen Volume 2 Nomor 2 Februari 2024.
- Mahsum, M, 2018, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Konsep dan Implementasi, Penerbit Rajawali Pers.
- Maman Abdul Rahman, Sambas, Ali Muhidin 2017, *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah**: Mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penggunaan indikator keuangan, termasuk rasio efektivitas dalam menilai kinerja keuangan daerah.
- Pratama, Y., & Siregar, M. (2023), The Impact of Fiscal Decentralization on Regional Development in Indonesia: A Case Study of Economic Growth and Public Services, Journal of Public Economics, 45(3), 221-239. .

- Rudin, M., Bakarbesy, M. L. F., & Fadlun, F. (2024). Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 186-199.
- Rudin, M., & Bakarbesy, M. L. F. (2024). Service Management of the Direct Cash Assistance Program in Lasoani Urban Village, Palu City, Central Sulawesi Province. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 823-833.
- Sari, O. D. S., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kota Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 49-59.
- Setiawan, D., & Nurdiansyah, A. (2024), Fiscal Autonomy and Local Government Performance: Evaluating the Effectiveness of Fiscal Decentralization in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*, 38(1), 56-71.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta